BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Todaro (2000) dalam Christea dan Imam (2018), pembangunan adalah proses yang melibatkan banyak aspek, termasuk perubahan pada struktur sosial, pola hidup masyarakat, dan kelembagaan di tingkat nasional. Pembangunan juga mencakup peningkatan ekonomi, pengurangan kesenjangan pendapatan, dan penurunan tingkat kemiskinan. Dalam meraih tujuan pembangunan ini, upaya harus difokuskan pada tiga hal utama: menambah ketersediaan serta distribusi kebutuhan dasar, dan memperkuat akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi serta sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Pembangunan pada dasarnya adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan yang nyata bagi penduduk suatu negara. Dalam proses ini, ada upaya terus-menerus yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, baik dijalankan jangka pendek ataupun jangka panjang. Seiring perkembangan zaman, tuntutan terhadap pembangunan semakin besar agar kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih luas.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sering menghadapi masalah utama berupa kesenjangan ekonomi ataupun ketimpangan pada distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan yang berpenghasilan rendah. Persoalan ketimpangan pendapatan ini tidak sekedar dialami negara berkembang saja, namun juga oleh negara maju. Perbedaannya ada pada tingkat atau skala ketimpangan yang terjadi, serta tingkat kesulitannya dalam menanggulangi masalah tersebut, yang biasanya ditentukan oleh luas wilayah dan jumlah penduduk di setiap negara (Mugabe dkk., 2018).

Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau, Indonesia memiliki wilayah dengan karakteristik yang sangat beragam. Perbedaan ini mempengaruhi kemampuan setiap daerah untuk tumbuh dan berkembang, ada wilayah yang mampu berkembang pesat sementara wilayah lain tumbuh lebih lambat. Perbedaan

dalam laju pertumbuhan ini kemudian menciptakan kesenjangan pendapatan antar daerah (Farhan & Sugianto, 2022).

Indeks Gini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Indeks ini juga membantu melihat seberapa merata pendapatan dan pengeluaran rumah tangga di berbagai wilayah. Indeks Gini, yang juga disebut Koefisien Gini, mempunyai nilai antara 0 - 1. Jika nilainya mendekati 0, artinya pendapatan di suatu wilayah didistribusikan secara merata atau setiap orang mempunyai pendapatan yang hampir sama. Sebaliknya, semakin mendekati 1 menandakan ketimpangan yang sangat tinggi, di mana satu individu memiliki sebagian besar pendapatan, sedangkan yang lain hampir tidak memiliki apa pun. Idealnya, Indeks Gini diharapkan mendekati 0 untuk mencerminkan pemerataan pendapatan di kalangan penduduk (Todaro dan Smith, 2006).

Pulau Sumatera mempunyai 10 provinsi, yakni Bengkulu, Sumatera Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Setiap provinsi menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik di wilayah-wilayah tersebut. Perbedaan ini menyebabkan kesenjangan antara daerah yang lebih berkembang dan yang tertinggal, terutama pada akses sumber daya, infrastruktur, dan peluang ekonomi. Sebagai contoh, provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan mempunyai tingkat kemiskinan yang lebih rendah daripada provinsi Aceh dan Lampung, yang masih menghadapi banyak tantangan dalam mengurangi kemiskinan.

Ketimpangan pembangunan antar daerah adalah hal yang biasa ditemui pada perekonomian suatu wilayah. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan sumber daya alam dan keadaan geografis di tiap daerah. Didasari atas perbedaan ini, kemampuan setiap daerah dalam mendorong pembangunan berbeda pula. Atas dasar tersebut, tidak jarang ditemukan daerah yang lebih maju dan daerah yang tertinggal. Ketimpangan ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di setiap daerah, yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan pembangunan yang perlu dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan tersebut (Safitri, dkk., 2021).

Tabel 1.1 Rasio Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera Tahun 2021-2023

NO	Provinsi	Rasio Gini			
		2021	2022	2023	Rata-rata
1	Aceh	0,323	0,291	0,296	0,303
2	Sumatera Utara	0,313	0,326	0,309	0,316
3	Sumatera Barat	0,3	0,292	0,28	0,291
4	Riau	0,327	0,323	0,324	0,325
5	Jambi	0,315	0,335	0,343	0,331
6	Sumatera Selatan	0,34	0,33	0,338	0,336
7	Bengkulu	0,321	0,315	0,333	0,323
8	Lampung	0,314	0,313	0,324	0,317
9	Kep. Bangka Belitung	0,247	0,255	0,245	0,249
10	Kep. Riau	0,339	0,325	0,34	0,335

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023) diolah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diamati bahwasanya sepanjang 3 tahun terakhir, ketimpangan pendapatan di provinsi yang terdapat di pulau Sumatera termasuk kategori ketimpangan sedang karena lebih kecil (<) dari 0,5 dengan rata-rata ketimpangan sebesar 0.313 persen. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tingkat gini rasio yang cenderung sifatnya fluktuatif dengan tren naik turun pada indeks gini. Di tahun 2021-2023, Indeks gini Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami penurunan setiap tahunnya pada tahun 2021 sebesar 0.247 persen kemudian turun menjadi 0.245 persen pada tahun 2023. Namun bisa dilihat indeks gini provinsi yang ada di Pulau Sumatera rata-rata berada di 0.3-0.35, Hal ini menandakan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi adalah ketimpangan sedang artinya pertumbuhan ekonomi belum dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di pulau Sumatera.

IPM suatu wilayah mencerminkan dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah di wilayah tersebut. Kebijakan pembangunan yang diterapkan memengaruhi tingkat IPM serta ketimpangan antar daerah di dalam negara atau wilayah tertentu. Hal ini memperlihatkan bahwasanya pilihan kebijakan yang diambil memiliki peranan penting dalam menentukan sejauh mana kemajuan dan pemerataan pembangunan di berbagai kabupaten atau kota.

IPM meliputi tiga unsur utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita, ketiganya berperan penting dalam menentukan kualitas hidup manusia. Pendidikan memiliki andil utama untuk memperkuat kemampuan individu dalam mengadopsi teknologi baru dan mengembangkan potensi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kesehatan sangat mempengaruhi produktivitas, karena kesehatan yang baik mempermudah pencapaian pendidikan. Kedua faktor ini yaitu pendidikan dan Kesehatan termasuk pilar penting pada pembangunan ekonomi dan berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan. Kesehatan dan pendidikan yang baik mendukung peningkatan pendapatan, sementara pendapatan yang tinggi memungkinkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dengan lebih mudah (Iskandar dkk, 2022).

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera Tahun 2021-2023

No.	Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (%) [Metode Baru]			
		2021	2022	2023	Rata-rata
1	Aceh	72,18	72,80	73,40	72,79
2	Sumatera Utara	72,00	72,71	73,37	72,69
3	Sumatera Barat	72,65	73,26	73,75	73,22
4	Riau	72,94	73,52	74,04	73,50
5	Jambi	71,63	72,14	72,77	72,18
6	Sumatera Selatan	70,24	70,90	71,62	70,92
7	Bengkulu	71,64	72,16	72,78	72,19
8	Lampung	69,90	70,45	71,15	70,50
9	Kep. Bangka Belitung	71,69	72,24	72,85	72,26
10	Kepulauan Riau	75,79	76,46	77,11	76,13

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023), diolah

Melalui tabel 1.2 terlihat bahwasanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera di tahun 2021-2023 mencapai rata-rata 72,64 persen. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan rata-rata IPM tertinggi dari tahun 2021-2023 yakni sebanyak 76.13 persen. Sedangkan provinsi dengan rata-rata IPM terendah dari tahun 2021-2023 yakni Provinsi Lampung dengan sebanyak 70.5 persen.

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah dua faktor utama dalam ekonomi makro yang sering dianggap menghalangi kemajuan pembangunan

ekonomi. Kondisi kemiskinan serta ketimpangan yang tinggi dapat menghambat usaha pemerintah guna menambah laju pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat (Marrero & Servén, 2022). Selain itu, kedua masalah ini memiliki dampak sosial ekonomi yang lebih besar, sebagai contohnya berkurangnya kesempatan kerja, naiknya tingkat pengangguran, dan bahkan bisa memicu timbulnya tindak kriminal di kalangan masyarakat (Anser dkk, 2020).

Tabel 1.3 Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera Tahun 2021-2023

No.	Provinsi	Tingkat Kemiskinan Dalam Persen			
		2021	2022	2023	Rata-rata
1	Aceh	15,53	14,75	14,45	15,14
2	Sumatera Utara	8,49	8,33	8,15	8,41
3	Sumatera Barat	6,04	6,04	5,95	6,04
4	Riau	7,00	6,84	6,68	6,92
5	Jambi	7,67	7,70	7,58	7,69
6	Sumatera Selatan	12,79	11,95	11,78	12,37
7	Bengkulu	14,43	14,34	14,04	14,39
8	Lampung	11,67	11,44	11,11	11,56
9	Kep. Bangka Belitung	4,67	4,61	4,52	4,64
10	Kep. Riau	5,75	6,03	5,69	5,89

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023), diolah

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Aceh termasuk provinsi yang mempunyai persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Sumatera dengan rata-rata sebanyak 15.14 persen, Bengkulu ada pada peringkat kedua dengan persentase penduduk miskin sebanyak 14.39 persen, selanjutnya ada provinsi Sumatera selatan melalui persentase penduduk miskin sebanyak 12.37 persen. Sementara itu provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah yakni Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 4.64 persen.

Tingkat kemiskinan tidak hanya mempengaruhi ketimpangan antar wilayah, namun faktor lain yang membawa dampak pada ketimpangan pendapatan yakni tingkat Upah Minimum Provinsi, tingkat Upah Minimum Provinsi yang rendah dapat mengakibatkan bertambahnya ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Pemerintah menentukan upah minimum provinsi melalui maksud memberi perlindungan hak para pekerja agar memperoleh upah yang layak. Oleh karena itu, perlu dilakukan penciptaan lebih banyak kesempatan kerja untuk mengatasi ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Tabel 1.4 Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021-2023 (Rupiah)

No.	Provinsi	Upah Minimum Provinsi		
		2021	2022	2023
1	Aceh	3.165.030	3.166.060	3.413.666
2	Sumatera Utara	2.499.422	2.522.609	2.710.493
3	Sumatera Barat	2.484.041	2.512.539	2.742.467
4	Riau	2.888.563	2.938.564	3.191.662
5	Jambi	2.630.161	2.698.940	2.943.033
6	Sumatera Selatan	3.043.111	3.144.446	3.404.177
7	Bengkulu	2.213.604	2.238.094	2.418.280
8	Lampung	2.431.324	2.440.486	2.633.284
9	Kep. Bangka Belitung	3.230.022	3.264.884	3.498.479
10	Kepulauan Riau	3.005.383	3.050.172	3.279.194

Sumber: (KEMNAKER, 2023), diolah

Melalui tabel 1.4 dapat dilihat bahwa Upah Minimum Provinsi di pulau Sumatera dari tahun 2021 - 2023 selalu naik di setiap tahunnya. Provinsi yang mempunyai UMP tertinggi yakni Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan Provinsi yang mempunyai UMP terendah adalah Bengkulu. Pada tahun 2022 peningkatan UMP yang terjadi tidak begitu signifikan dikarenakan Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19 yang menyebabkan kurangnya pendapatan atau pemasukan akibat dari kebijakan pembatasan mobilitas untuk mencegah penyebaran wabah yang semakin luas.

Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai determinan ketimpangan pendapatan. Misalnya, studi oleh Rizky Fanshuri, dan Putu Mahardika Adi Saputra (2022) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berperan signifikan dalam menekan ketimpangan pendapatan, karena peningkatan IPM mencerminkan perbaikan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan temuan Geryn Saptono, Marseto, dan Sishadiyati (2022), yang menekankan bahwa IPM berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan.

Selain itu, tingkat kemiskinan juga menjadi faktor penting dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan. Penelitian oleh Rifki Khoirudin, dan

Jannatul Liutammima Musta'in (2020) mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan, karena kelompok masyarakat miskin sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi dan peluang kerja. Studi ini juga menggarisbawahi perlunya kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Upah Minimum Provinsi juga menjadi variabel yang menarik untuk dikaji dalam konteks ketimpangan pendapatan. Studi oleh Agam Firdaus dan Maulidyah Indira (2023) menunjukkan bahwa UMP memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, di mana kenaikan UMP dapat meningkatkan pendapatan kelompok pekerja formal, namun dampaknya terhadap pekerja informal cenderung terbatas. Oleh karena itu, kebijakan UMP harus disertai dengan upaya pemberdayaan sektor informal agar manfaatnya lebih merata.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat hubungan yang erat antara IPM, tingkat kemiskinan, dan UMP dengan ketimpangan pendapatan. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis ketiga variabel ini secara bersamaan di Pulau Sumatera. Dengan latar belakang ini, penelitian berjudul "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera" bertujuan untuk mengisi celah penelitian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi kesenjangan pendapatan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disajikan dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, Upah Minimum Provinsi dan ketimpangan pendapatan pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2017-2023?

2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, dan Upah Minimum Provinsi terhadap ketimpangan pendapatan pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2017-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis kondisi Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan dan Upah Minimum Provinsi, dan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera Tahun 2017-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan dan Upah Minimum Provinsi terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera Tahun 2017-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan dunia pendidikan dan pengetahuan, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik dengan topik serupa. Selain itu, kajian ini diharapkan menjadi literatur yang berguna untuk kalangan akademis dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketimpangan antar wilayah.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran atau referensi bagi pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan pengelolaan daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.